Doktrina: Journal of Law

Available online <http://ojs.uma.ac.id/index.php/doktrina>

Asas Ultimum Remedium/The Last Resort Principle Terhadap Pelaku Usaha dalam Hukum Perlindungan Konsumen

The Ultimum Remedium/Last Resort Principle of Business Actors in Consumer Protection Law

Beby Suryani Fitri*, Riswan Munthe, Anggreni Atmei Lubis*****

Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Indonesia

*Corresponding Email: bebysuryani07@gmail.com, riswan@staff.uma.ac.id, anggreniatmeilubis@gmail.com

Diterima: Februari 2021; Disetujui: April 2021; Dipublish: April 2021

Abstrak

Perlindungan konsumen harus mendapat perhatian yang lebih, karena investasi asing telah menjadi bagian pembangunan ekonomi Indonesia, dimana ekonomi Indonesia juga berkaitan dengan ekonomi dunia yang dapat membawa implikasi negatif bagi konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adopsi asas ultimum remedium dalam hukum perlindungan konsumen dan untuk mengetahui asas ultimum remedium terhadap pelaku usaha dalam hukum perlindungan konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan sumber data sekunder dan dianalisis secara deduktif. Hasil penelitian bahwa keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup. Terbukti bahwa semua norma perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen memiliki sanksi pidana. Hadirnya sanksi pidana dalam peraturan perlindungan konsumen merupakan bentuk ultimum remedium (alternatif terakhir) manakala penyelesaian sengketa perlindungan konsumen melalui jalur hukum lainnya tidak mumpuni.

Kata Kunci: Asas Ultimum Remedium, Pelaku Usaha, Perlindungan Konsumen

Abstract

Consumer protection should receive more attention, because foreign investment has become part of Indonesia's economic development, where the Indonesian economy is also related to the world economy which can have negative implications for consumers. This study aims to determine the adoption of the ultimum remedium principle in consumer protection law and to determine the ultimum remedium principle of business actors in consumer protection law. The research method used is a normative juridical research method with secondary data source and analyzed deductively. The research desire to be achieved in consumer protection is to create a sense of security for consumers in meeting the needs of life. It is proven that all consumer protection norms in the Consumer Protection Law have criminal sanctions. The presence of criminal sanctions in consumer protection regulations is a form of ultimum remedium (the last alternative) when resolving consumer protection disputes through other legal channels is not sufficient.

Keywords: Ultimum Remedium, Business Actors, Consumer Protection

How to Cite: Suryani Fitri. B., Munthe. R. Anggreni Atmei Lubis. (2021). Asas Ultimum Remedium/The Last Resort Principle Terhadap Pelaku Usaha Dalam Hukum Perlindungan Konsumen. *Doktrina: Journal of Law*. 4 (1): 68-83

PENDAHULUAN

Perkembangan perekonomian yang pesat telah menghasilkan beragam jenis dan variasi barang dan/atau jasa. Dengan dukungan teknologi dan informasi, perluasan ruang, gerak dan arus transaksi barang dan/atau jasa telah melintasi batas-batas wilayah Negara, konsumen pada akhirnya dihadapkan pada berbagai pilihan jenis barang dan/atau jasa yang ditawarkan secara variatif. Kondisi seperti ini, pada satu sisi menguntungkan konsumen karena kebutuhan terhadap barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi dengan beragam pilihan. Namun, pada sisi lain, fenomena tersebut menempatkan kedudukan konsumen terhadap produsen menjadi tidak seimbang, dimana konsumen berada pada posisi yang lemah. Karena konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang besarnya melalui kiat promosi dan cara penjualan yang merugikan konsumen. (Zulham: 2016).

Ketidakberdayaan konsumen dalam menghadapi produsen jelas sangat merugikan kepentingan rakyat. Pada umumnya produsen berlindung di balik *standard contract* atau perjanjian baku yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak, yakni antara konsumen dan

produsen, ataupun melalui informasi semu yang diberikan oleh produsen kepada konsumen. Hal tersebut bukan menjadi gejala regional saja, tetapi sudah menjadi persoalan global yang melanda seluruh konsumen di dunia. Timbulnya kesadaran konsumen ini telah melahirkan satu cabang baru ilmu hukum, yaitu hukum perlindungan konsumen.

Perlindungan konsumen merupakan konsekuensi dan bagian dari kemajuan teknologi dan industri. Kemajuan teknologi dan industri tersebut ternyata telah memperkuat perbedaan antara pola hidup masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Masyarakat tradisional dalam memproduksi barang-barang kebutuhan konsumen secara sederhana, dan hubungan antara konsumen, dan masyarakat tradisional relatif masih sederhana, dimana konsumen dan produsen dapat bertatap muka secara langsung. Adapun masyarakat modern memproduksi barang-barang kebutuhan konsumen secara massal, sehingga menciptakan konsumen secara massal pula (*mass consumer consumption*). Akhirnya hubungan antara konsumen dan produsen menjadi rumit, dimana konsumen tidak mengenal siapa produsennya, demikian pula sebaliknya,

bahkan produsen tersebut berada di Negara lain. (Inosentius Samsul : 2004)

Karena itu pula, perlindungan konsumen memiliki hubungan yang erat dengan globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi membawa konsekuensi bahwa semua barang dan/atau jasa yang berasal dari Negara lain dapat masuk ke Indonesia. Untuk itu, perlindungan konsumen tidak saja terhadap barang-barang yang berkualitas rendah, namun juga terhadap barang-barang yang dapat membahayakan konsumen. Sehingga keputusan konsumen untuk membeli suatu barang dan/atau jasa, atau tidak membeli sama sekali merupakan respons konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang tersedia.

Hubungan hukum antara produsen dan konsumen memiliki tingkat ketergantungan yang cukup tinggi hubungan hukum antara produsen dan konsumen yang berkelanjutan telah terjadi sejak proses produksi, distribusi, pemasaran, dan penawaran. Hubungan hukum antara konsumen dan produsen telah mengalami perubahan konstruksi hukum, yakni hubungan yang semula dibangun atas prinsip *caveat emtor* berubah menjadi *caveat venditor*. Karena keberpihakan kepada konsumen sesungguhnya merupakan wujud nyata

dari ekonomi kerakyatan. Di Indonesia, untuk melindungi kepentingan konsumen dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan pengaturan hak-hak konsumen melalui undang-undang pembentukan undang-undang tersebut merupakan bagian dari implementasi sebagai Negara kesejahteraan, karena Undang Undang Dasar 1945 di samping sebagai konstitusi politik juga dapat disebut sebagai konstitusi ekonomi yang mengandung ide Negara kesejahteraan. (Zulham: 2016)

Beberapa argumentasi tentang pentingnya intervensi pemerintah terkait dengan perlindungan konsumen, yakni : Pertama, dalam masyarakat modern, produsen menawarkan berbagai jenis produk yang diproduksi secara massal (*mass production and consumption*). Kedua, hasil produksi dengan cara massal dan teknologi canggih, potensial bagi munculnya resiko produk cacat, tidak memenuhi standar (*substandard*), dan bahkan berbahaya (*hazardous product*) yang merugikan konsumen. Ketiga, hubungan antara konsumen dan produsen berada pada posisi yang tidak seimbang. Keempat, persaingan yang sempurna (*perfect competition*) sebagai pendukung *consumer sovereignty theory* dalam praktiknya jarang terjadi.intervensi

pemerintah sangat dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi, untuk menetapkan dan menegakkan peraturan perundang-undangan dalam bidang ekonomi, termasuk pengaturan konsumen. Namun, jika tidak ada intervensi pemerintah dalam bidang ekonomi, maka hal ini dapat menimbulkan distorsi ekonomi. Pandangan ini berpendapat bahwa ekonomi hanya berfungsi bila ada kerangka hukum yang melandasinya.

Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen, Pemerintah Indonesia mengatur hak-hak konsumen yang harus dilindungi. Undang-Undang Perlindungan Konsumen bukanlah anti terhadap produsen, namun sebaliknya malah merupakan apresiasi terhadap hak-hak konsumen secara universal. Karena sesungguhnya perlindungan konsumen adalah bagian dari perlindungan hak asasi manusia (HAM). Bahwa ruang lingkup konsep HAM tidak hanya dalam konteks hubungan antara rakyat dan Negara, namun lebih luas lagi HAM perspektif hubungan antar masyarakat, yakni hubungan antara produsen konsumen. Dalam hal ini, produsen mengakui eksistensi konsumen sebagai manusia yang memiliki hak-hak universal dan patut memperoleh apresiasi secara positif.

Perlindungan konsumen harus mendapat perhatian yang lebih, karena investasi asing telah menjadi bagian pembangunan ekonomi Indonesia, dimana ekonomi Indonesia juga berkaitan dengan ekonomi dunia. Persaingan internasional dapat membawa implikasi negatif bagi konsumen. Perlindungan konsumen tidak saja terhadap barang-barang berkualitas rendah, akan tetapi juga terhadap barang-barang yang membahayakan kehidupan masyarakat.

Segala upaya yang dimaksudkan dalam perlindungan konsumen tersebut tidak saja terhadap tindakan preventif, akan tetapi juga tindakan represif dalam semua bidang perlindungan yang diberikan kepada konsumen. Maka pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan :

Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses informasi, serta menjamin kepastian hukum.

Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha

Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa

Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan

Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan paa bidang-bidang lainnya. (Husni Syawali dan Neni Sri Imayati : 2000)

Keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup. Terbukti bahwa semua norma perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen memiliki sanksi pidana. Hadirnya sanksi pidana dalam peraturan perlindungan konsumen merupakan bentuk ultimum remedium (alternatif terakhir) manakala penyelesaian sengketa perlindungan konsumen melalui jalur hukum lainnya tidak mumpuni. Hal ini menarik untuk diteliti mengingat sanksi pidana berada dalam koridor hukum pidana sementara perlindungan konsumen berada dalam koridor hukum perdata sehingga penggunaan sanksi pidana terhadap pelaku usaha dalam aspek hukum perlindungan konsumen merupakan perkembangan dalam ilmu pengetahuan yang tidak lagi memberlakukan ketentuan hukuman secara kaku hanya dalam koridor hukum pidana.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka fokus pembahasan dalam tulisan ini adalah mengenai adopsi/keberadaan asas ultimum remedium dalam hukum perlindungan konsumen dan bagaimana asas ultimum remedium terhadap pelaku usaha dalam hukum perlindungan konsumen.

METODE PENELITIAN

Menurut Soerjono Soekanto bahwa metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian. (Soerjono Soekanto : 1995)

Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode pencarian asas sesuatu (inquiry) secara sistematis dengan adanya penekanan bahwa pencarian ini dimana dilakukan terhadap suatu masalah-masalah yang dapat dipecahkan. (Moh Nazir : 1998) Yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya”.

Jenis dan sifat Penelitian

Penelitian ini jenisnya penelitian yuridis normatif. Pendekatan yuridis Normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan atau kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Bentuk dari hasil penelitian ini akan dituangkan secara deskriptif. Suatu penelitian deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang seteliti mungkin manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, (Johny Ibrahim : 2008)

Berdasarkan rumusan permasalahan dan tujuan dari penelitian ini, maka penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistemik, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan fenomenal yang diselidiki. (Soerjono Soekanto² : 1995)

Sumber Data

Dalam penelitian ini diperoleh melalui data sekunder yaitu data yang dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap bahan kepustakaan. Di dalam penelitian hukum, data sekunder terdiri dari:

Bahan hukum primer

Bersumber dari bahan hukum yang diperoleh langsung dan akan digunakan

dalam penelitian ini yang merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yaitu : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Bahan hukum sekunder

Yang merupakan bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan-bahan hukum primer, yang terdiri dari :

- 1) Buku-buku literatur
- 2) Putusan-putusan pengadilan negeri dan mahkamah agung
- 3) Jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan arbitrase
- 4) Makalah-makalah/laporan penelitian
- 5) Artikel-artikel, media massa dan internet.

Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan lain-lain.

Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang diharapkan. Metode

Pengumpulan data ada 2 (dua) yaitu metode studi pustaka (library research) dan metode studi lapangan (field research). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, diperoleh dari studi pustaka (library research), peraturan perundang-undangan, catatan hukum, putusan hakim, dikumpulkan dan dikaji guna menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah.

Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisa data kualitatif, dimana data yang terkumpul tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran. Akan tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta pandangan informasi untuk menjawab permasalahan penelitian ini.

Analisis kualitatif menghasilkan data deskriptif, dengan cara penarikan data dari induktif ke deduktif dalam arti apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis, lisan dan perilaku nyata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adopsi Asas Ultimum Remedium Dalam Hukum Perlindungan Konsumen

Asas hukum adalah prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatarbelakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum. Peraturan konkret

(seperti undang-undang) tidak boleh bertentangan dengan asas hukum, demikian pula dalam putusan hakim, pelaksanaan hukum dan sistem hukum. Apabila dalam sistem hukum terjadi pertentangan, maka asas hukum akan tampil untuk mengatasi pertentangan tersebut. Misalnya, terjadi pertentangan antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya, maka harus kembali melihat asas hukum sebagai prinsip dasar yang mendasari suatu peraturan hukum berlaku secara universal. (Marwan Mas : 2004).

Asas hukum senantiasa berkaitan dengan kaidah hukum (norma hukum) atau peraturan hukum tertulis. Asas hukum merupakan landasan dan jantung dari pertauran konkret sebagai dasar-dasar pemikiran abstrak, dan di dalamnya terkandung nilai-nilai etis yang harus diwujudkan dalam peraturan tertulis. Perbedaan antara asas hukum dengan kaidah hukum yakni :

Asas hukum merupakan dasar pemikiran yang umum dan abstrak, sedangkan kaidah hukum merupakan aturan konkret dan riil

Asas hukum adalah suatu konsep atau ide yang mengandung nilai-nilai etis, sedangkan kaidah hukum adalah penjabaran dari ide tersebut yang

diharapkan juga mengandung nilai-nilai etis

Asas hukum tidak mempunyai sanksi (ancaman sanksi), sedangkan kaidah hukum mempunyai sanksi

Keberadaan asas hukum dalam sistem hukum merupakan ketentuan prinsip dalam menyelesaikan konflik dalam sistem hukum itu sendiri. Termasuk dalam melakukan rekayasa sosial, asas hukum dapat dijadikan dasar sebagaimana fungsinya untuk mewujudkan pembangunan hukum nasional yang dinamis dan kondusif. Menjaga ketaatan terhadap asas hukum, akan membuat sistem hukum dan sistem peradilan nya bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing.

Fungsi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (*rechtsguterschutz*) dengan sanksi berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang ilmu hukum lainnya. Sanksi pidana itu di dalamnya terdapat suatu *tragic* (sesuatu yang menyedihkan) sehingga hukum pidana dikatakan mengiris dagingnya sendiri atau sebagai pedang bermata dua. Hal tersebut bermakna bahwa hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan-

kepentingan hukum (misalnya, nyawa, harta benda, kemerdekaan, kehormatan), namun jika terjadi pelanggaran terhadap larangan dan perintahnya justru menyakiti kepentingan (benda) hukum si pelanggar. Perlu diingat pula, bahwa sebagai alat *social control*, fungsi hukum pidana adalah subsidair, artinya hukum pidana hendaknya baru diadakan/dipergunakan apabila usaha-usaha lain kurang memadai. (Mohammad Ekaputra : 2010)

Van Bemmelen menyatakan bahwa yang membedakan antara hukum pidana dan bidang hukum lain ialah sanksi hukum pidana merupakan pemberian ancaman penderitaan dengan sengaja dan sering juga pengenaan penderitaan, hal mana dilakukan juga sekalipun tidak ada korban kejahatan. Perbedaan demikian menjadi alasan untuk menganggap hukum pidana itu sebagai *ultimum remedium*, yaitu upaya terakhir guna memperbaiki tingkah laku manusia terutama penjahat serta memberikan tekanan psikologis agar orang lain tidak melakukan kejahatan. (Zainal Abidin Farid : 2007).

Asas *ultimum remedium* bukanlah asas konstitusional, namun lebih pada etika legislatif, mulai saat kriminalisasi atau menjadikan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi tindak pidana. Doktrin ini harus dipahami

dalam kerangka asas-asas yang berkaitan dengan nilai-nilai kebutuhan, efisiensi, keterbatasan, asas kemanfaatan, pertimbangan analisa biaya dan hasil serta asas kemanusiaan, baik yang berkaitan dengan kepentingan pelaku maupun kepentingan korban tindak pidana.

Sanksi hukum pidana adalah alat pertahanan terakhir yang baru dapat digunakan ketika bidang hukum lain tidak mampu mengendalikan suatu perbuatan yang dimanifestasikan dalam tataran kebijakan fungsionalisasi hokum pidana melalui peraturan perundang-undangan (kebijakan legislatif). *Ultimum remedium* tidak hanya berarti berhemat dalam menggunakan hukum pidana, tetapi juga berhemat dalam menegakkan hukum pidana. Jadi hukum pidana bersifat *ultimum remedium* bukan hanya dalam tataran formulasi (yaitu ketika memutuskan untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana), tetapi juga dalam tetaran aplikasi (yaitu ketika menerapkan hukum pidana terhadap peristiwa konkrit).

Terkait dengan adopsi atau keberadaan asas *ultimum remedium* dalam hukum perlindungan konsumen maka hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan syarat-syarat kriminalisasi dalam sistem peradilan

pidana, mulai dari proses legislasi, penegakan hukum sampai dengan penerapan sanksi pidananya. Refleksi asas *ultimum remedium* dalam hukum perlindungan konsumen dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Perbuatan harus benar-benar viktimogen dan/atau kriminogen, baik aktual maupun potensial;

Perbuatan harus memenuhi elemen sub-sosialitas, (Vrij : ada bahaya terhadap kehidupan masyarakat);

Upaya lain untuk mengatasi perbuatan tercela tersebut ternyata tidak efektif;

Kerugian dalam penggunaan hukum pidana tidak lebih besar daripada akibat tindak pidana atau hasil sampingannya (asas *cost and benefit analysis*);

Memperoleh dukungan masyarakat (*public support*);

Diperkirakan kriminalisasi akan efektif (*enforceable*);

Dapat meredam faktor kriminogen dan pelaku potensial (Anselm Von Feurbach: *Theorie des Psychischen Zwanges*);

Memperhatikan asas ketepatan dan ketelitian serta differensiasi kepentingan (*principle of precision and differentiation*) dalam pengaturan dan penerapan (*lex certa principle*) ;

Mempertimbangkan sepenuhnya karakter “*malum in se*” (*wrong or evil itself*) dan “*malum prohibitum*” (*criminal are not because they are inherently bad, but because the act is prohibited by the law of the state*);

Digunakan secara berpasangan (*acting in concert*) dengan pendekatan non-penal yang bersifat preventif, bahkan preemtif (*prevention without punishment*), termasuk di dalamnya pendayagunaan pengaturan hukum perdata dan hukum administratif;

Tidak bersifat *ad hoc*, tetapi selalu bersifat sistemik (tujuan jelas, keterkaitan dengan norma lain, pendekatan menyeluruh, keterbukaan, transformasi nilai dan mekanisme kontrol) dalam kerangka hukum pidana secara keseluruhan;

Jangan berorientasi pada tujuan pembalasan semata-mata (*backward and forward looking*). Tujuan pemidanaan (*the aim of punishment*) dalam RUU KUHP : pencegahan, prevensi spesial, prevensi general, penyelesaian konflik, pemanfaatan, dan pembebasan rasa bersalah ;

Menyadari bahwa penegakan hukum pidana merupakan sub sistem penegakan hukum dalam arti luas (*law enforcement policy*) dan semuanya merupakan bagian

dari sistem kebijakan sosial (*social policy*) yang mencakup fungsi kesejahteraan dan keamanan (*prosperity and security*);

Menyadari secara sistemik kedudukan hukum sistem peradilan pidana sebagai bagian dari “*science of response*” berupa kebijakan criminal (*criminal policy*) yang harus didukung oleh kerangka teoritik (*discipline and allied science*) dan kriminologi sebagai ‘*science of cause*’;

Selalu mengikuti perkembangan hukum pidana di tingkat internasional (*convention, treaty, custom, doctrine, principle and court decision*) dalam kerangka harmonisasi hukum dalam kerjasama antar bangsa.

Sehubungan dengan adopsi asas *ultimum remedium* di dalam hukum perlindungan konsumen maka, sanksi hukum pidana harus disepadankan dengan kebutuhan untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan-kepentingan sosial. Pidana hanya dibenarkan apabila ada kebutuhan yang berguna bagi masyarakat pidana yang tidak diperlukan, tidak dapat dibenarkan dan berbahaya bagi masyarakat. Selain itu, batas-batas sanksi pidana ditetapkan pula berdasarkan kepentingan sosial dan nilai yang mewujudkannya. Berdasarkan hal tersebut, maka menurut Bassiouni disiplin

hukum pidana bukan hanya pragmatis tetapi juga suatu disiplin yang berorientasi pada nilai (*not only pragmatic but also value based and value oriented*). (Teguh Prasetyo : 2010)

Adopsi asas *ultimum remedium* ke dalam hukum perlindungan konsumen juga harus mempedomani beberapa prinsip seperti yang dinaytakan oleh Nigel Walker yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief berikut :

Sanksi hukum pidana jangan digunakan semata-mata untuk tujuan pembalasan/retributif;

Jangan menggunakan hukum pidana untuk memidana perbuatan yang tidak merugikan/membahayakan;

Jangan menggunakan hukum pidana untuk mencapai tujuan yang dapat dicapai secara lebih efektif dengan sarana-sarana lain yang lebih ringan ;

Jangan menggunakan hukum pidana apabila kerugian/bahaya dari perbuatan/tindak pidana itu sendiri;

Larangan-larangan hukum pidana jangan memuat atau mengandung sifat lebih berbahaya daripada perbuatan yang akan dicegah;

Hukum pidana jangan memuat larangan-larangan yang tidak mendapat dukungan kuat dari publik;

Hukum pidana jangan memuat larangan/ketentuan yang tidak dapat dilaksanakan/dipaksakan (*unenforceable*).

Penempatan sanksi pidana sebagai *ultimum remedium* dalam hukum perlindungan konsumen harus dilakukan secara tepat setelah sanksi-sanksi hukum yang lain dianggap tidak memadai.

Asas Ultimum Remedium Terhadap Pelaku Usaha Dalam Hukum Perlindungan Konsumen

Instrumen hukum pidana memiliki peranan penting dalam hukum perlindungan konsumen, karena sifat sanksinya yang tegas dan mampu memberantas pelanggaran konsumen. Meski instrumen hukum pidana pada perlindungan konsumen berlaku sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*).

Pencantuman sanksi pidana di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 salah satunya diberlakukan terhadap jenis usaha yang hasil produknya membahayakan kesehatan konsumen. Adapun sanksi pidana nya diatur di dalam Pasal 61 sampai Pasal 63.

Berdasarkan Pasal 61 yang berbunyi: (1) “penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya”. Dengan ketentuan pasal

tersebut bahwa badan usaha (badan hukum atau bukan badan hukum, perusahaan swasta atau publik, koperasi, dan sebagainya) dapat diajukan sebagai terdakwa dalam perkara pidana, di samping mereka yang bekerja sebagai pengurusnya. Dengan demikian terlihat pelaku tindak pidana berdasarkan ketentuan Pasal 61 adalah perusahaan dan/atau pengurus perusahaannya. Memperhatikan perumusan delik dalam Pasal 61 di atas, yang dapat dipertanggungjawabkan (yang menjadi subjek tindak pidana) adalah “pelaku usaha”. Menurut Pasal 1 sub 3, “pelaku usaha” adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun bukan. Namun di dalam Undang-Undang ini tidak ada ketentuan mengenai kapan atau dalam hal bagaimana suatu badan usaha/badan hukum dikatakan telah melakukan tindak pidana. Yang ada hanya ketentuan, bahwa penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha atau pengurusnya.

Sementara pada Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 menentukan secara limitatif tentang perbuatan-perbuatan yang dapat dikriminalisasi dan dijatuhi sanksi hukum pidana. Pasal 62 yang berbunyi : (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2). Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b. Huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Kemudian ayat (2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.00,00 (lima ratus juta rupiah). Sedangkan ayat (3) terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap, atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku. Kelompok I (Pasal 62 ayat 1) diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 2000. 000.000,00 (dua miliar rupiah). Kelompok I ini terdiri dari tindak pidana berupa pelanggaran yakni, Pasal 8 yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan pelaku usaha dalam memproduksi dan atau memperdagangkan yang dilarang, seperti perbuatan tidak memenuhi atau tidak sesuai standar, tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau jumlah netto sebagai

dinyatakan dalam label, tidak sesuai ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran sebenarnya. Pasal 9 mengenai penawaran, promosi dan mengiklankan secara tidak benar. Perbuatan –perbuatan tersebut termasuk dalam tahap pratransaksi konsumen. Artinya perilaku usaha sebelum transaksi terjadi (sebelum jual beli, penyewaan, atau lain-lain perbuatan dalam bidang penawaran produk konsumen). Pasal 10 mengenai penawaran, promosi atau pengiklanan untuk perdagangan barang atau jasa yang tidak benar atau menyesatkan. Pasal 13 ayat (2) mengenai hal menawarkan atau mempromosikan/mengiklankan obat, suplemen makanan, alat kesehatan termasuk jasa pelayanan kesehatan dengan menjanjikan hadiah barang atau jasa.

Kelompok II (diatur dalam ayat 2) yang diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Kelompok II ini terdiri dari tindak pidana yang berupa pelanggaran. Pasal 11 mengelabui/menyesatkan konsumen dalam penjualan melalui cara obral atau lelang. Pasal 12 menawarkan, mempromosikan, mengiklankan barang dengan harga/tarif khusus dalam waktu

dan jumlah tertentu, padahal pelaku usaha tidak bermaksud melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan/dipromsikan/diiklankan.

Pasal 13 menawarkan, mempromosikan, mengiklankan barang/jasa dengan menjanjikan hadiah Cuma-Cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikan. Pasal 14 pelaku usaha yang menawarkan barang/jasa untuk diperdagangkan dengan memberi hadiah melalui undian; tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan, mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa, memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan, mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan.

Kemudian menurut Pasal 16 pelaku usaha dalam menawarkan barang/jasa melalui pesanan; tidak menepati pesanan dan/ atau kesepakatan yang telah dijanjikan, tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan atau prestasi. Pasal 17 pelaku usaha periklanan memproduksi iklan yang tidak memuat informasi mengenai resiko pemakaian barang/jasa, pelaku usaha periklanan memproduksi iklan yang melanggar etika dan/atau peraturan per UU mengenai periklanan.

Pembagian dua kelompok tindak pidana perlindungan konsumen dalam Pasal 62 ayat 1 dan 2 di atas, hanya didasarkan pada jumlah maksimum ancaman pidananya. Dari ketentuan sanksi pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut terdapat 2 (dua) tingkatan, yaitu sanksi pidana penjara lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan sanksi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Ancaman pidana dalam Pasal 62 di atas berlaku semua pelaku usaha, baik orang perseorangan maupun badan usaha/badan hukum.

Dalam Pasal 62 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, berlakunya ketentuan pidana dari perundang-undangan lainnya (termasuk KUHP) hanyalah yang menyangkut perbuatan yang menimbulkan luka berat, sakit, cacat tetap, atau kematian. Ketentuan pidana dalam Pasal 62 (3) tersebut memberlakukan dua aturan hukum sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, yaitu sepanjang akibat perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku usaha atau perusahaan sebagai subjek hukum,

memenuhi kualifikasi yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap, atau kematian konsumen diberlakukan ketentuan hukum pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sementara di luar tingkat pelanggaran tersebut berlaku ketentuan pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Pasal 63 Undang-Undang perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 berbunyi: “terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:

- 1) Perampasan barang tertentu;
- 2) Pengumuman keputusan hakim;
- 3) Pembayaran ganti rugi;
- 4) Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- 5) Kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
- 6) Pencabutan izin usaha.”

Dengan demikian setiap pelaku usaha tindak pidana tertentu yang disebutkan dalam Pasal 62, dapat pula dijatuhi hukuman tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 63 tersebut.

Peraturan sanksi pidana yang terdapat dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen ini memuat

aturan-aturan hukum tentang perlindungan kepada konsumen yang berupa payung bagi perundang-undangan lainnya yang menyangkut konsumen, sekaligus mengintegrasikan perundang-undangan lain yang terkait dengan perlindungan konsumen, sehingga memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen. Adapun pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan tujuan:

- 1) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur
- 2) keterbukaan akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum
- 3) Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan
- 4) seluruh pelaku usaha.
- 5) Meningkatkan kualitas barang/produk.
- 6) Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktek usaha menipu dan menyesatkan.
- 7) Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lain. (Ali Mansyur: 2007)

SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat ditarik simpulan bahwa Adopsi sanksi pidana sebagai ultimum remedium dalam hukum perlindungan konsumen dilakukan secara tepat apabila sanksi-sanksi hukum yang lain dianggap tidak memadai. Sehubungan dengan adopsi asas *ultimum remedium* di dalam hukum perlindungan konsumen maka, sanksi hukum pidana harus disepadankan dengan kebutuhan untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan sosial. Pidana hanya dibenarkan apabila ada kebutuhan yang berguna bagi masyarakat. Asas *ultimum remedium* terhadap pelaku usaha dalam hukum perlindungan konsumen dapat dilihat melalui pencantuman sanksi pidana di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 salah satunya diberlakukan terhadap jenis usaha yang hasil produknya membahayakan kesehatan konsumen. Adapun sanksi pidana nya diatur di dalam Pasal 61 sampai Pasal 63.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali mansyur. (2007). Penegakan Hukum Tentang Tanggung Gugat Produsen Dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen. Yogyakarta : Genta Press
- Husni Syawali dan Neni Sri Imayati. (2000). Hukum Perlindungan Konsumen, Bandung : Mandar Maju

- Inosentius Samsul. (2004). Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak, Jakarta : Universitas Indonesia
- Johnny Ibrahim, (2008). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Banyumedia publishing
- Marwan Mas. (2004). Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Mohammad Ekaputra. (2010). Dasar-dasar Hukum Pidana. Medan : USU Press
- Soerjono Soekanto, (1995. Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Soerjono Soekanto (2) 1998. Metodologi Research, Yogyakarta : Andi Offset
- Teguh Prasetyo. (2010). Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana. Bandung : Nusa Media
- Yusuf Shofie, (2011). Tanggung Jawab Pidana Korporasi Dalam Hukum perlindungan Konsumen Di Indonesia, Bandung : Citra Aditya bakti.
- Zulham. (2016). Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta : Prenada Media Grup
- Zainal Abidin Farid. (2007). Hukum Pidana I. Jakarta : Sinar Grafika
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.